



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN  
TIM SENERGI BADAN KEAHLIAN  
SETJEN DPR RI**

# **KEGIATAN**

## **MS III Tahun Sidang 2021-2022**

### **(07 - 18 Februari 2022)**

---

**INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN**

**DIKELOLA OLEH:**

**TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.**

## DAFTAR ISI

<b>KOMISI II .....</b>	<b>1</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	1
B. FUNGSI ANGGARAN .....	3
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	4
D. TUGAS KHUSUS .....	10
<b>KOMISI III .....</b>	<b>12</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	12
B. FUNGSI ANGGARAN .....	13
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	13
<b>KOMISI IV .....</b>	<b>18</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	18
B. FUNGSI ANGGARAN .....	18
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	18
<b>KOMISI V .....</b>	<b>20</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	20
B. FUNGSI ANGGARAN .....	20
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	20

<b>KOMISI VI .....</b>	<b>36</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	36
B. FUNGSI ANGGARAN .....	36
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	36
<b>KOMISI VII .....</b>	<b>46</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	46
B. FUNGSI ANGGARAN .....	46
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	46
<b>KOMISI VIII .....</b>	<b>48</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	48
B. FUNGSI ANGGARAN .....	49
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	51
<b>KOMISI IX .....</b>	<b>53</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	53
B. FUNGSI ANGGARAN .....	53
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	54

<b>KOMISI X</b> .....	<b>66</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	66
B. FUNGSI ANGGARAN .....	67
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	67
<b>KOMISI XI</b> .....	<b>69</b>
A. FUNGSI LEGISLASI .....	69
B. FUNGSI ANGGARAN .....	70
C. FUNGSI PENGAWASAN .....	71
<b>BADAN LEGISLASI</b> .....	<b>77</b>
<b>BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN</b> .....	<b>78</b>
<b>MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN</b> .....	<b>85</b>
<b>BADAN ANGGARAN</b> .....	<b>86</b>
<b>BADAN URUSAN RUMAH TANGGA</b> .....	<b>91</b>
<b>BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA</b> .....	<b>93</b>

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI II

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	7 RUU tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara)	a. Penyusunan b. Pembahasan c. <i>Harmonisasi</i> ; d. <i>Prolegnas</i> ; e. <i>Pemantauan &amp; peninjauan</i>	Raker Tingkat 1 dengan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, terkait pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan pendapat/pandangan dari Menteri Dalam Negeri RI dan Ketua Komite I DPD RI terhadap 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara).</li> <li>2. Pemerintah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI dan akan dibahas dalam Panja.</li> <li>3. Komisi II DPR RI menyetujui pembentukan Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi (Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara).</li> </ol>

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	7 RUU tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara)	a. Penyusunan b. Pembahasan c. <i>Harmonisasi</i> ; d. <i>Prolegnas</i> ; e. <i>Pemantauan &amp; peninjauan</i>	RDP Komisi II DRP RI dengan Komite I DPD RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian PPN/Bappenas RI, dan Kementerian Hukum dan HAM RI, terkait pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi  (Panja Panja Pembahasan 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi)	1. Undang-Undang pembentuk provinsi dapat dikatakan kadaluarsa karena dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan UUDS Tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat, serta masih tergabung dalam satu Undang-Undang. 2. Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mensyaratkan perubahan harus diikuti dengan perubahan pada batang tubuh. 3. Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui pembahasan RUU dilanjutkan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	7 RUU tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan</li> <li>b. Pembahasan</li> <li>c. <i>Harmonisasi</i>;</li> <li>d. <i>Prolegnas</i>;</li> <li>e. <i>Pemantauan &amp; peninjauan</i></li> </ul>	Raker Tingkat 1 ke-2 dengan Komite I DPD RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PPN/Bappenas RI, dan Menteri Hukum dan HAM RI, terkait laporan Panja 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi ke Raker Tingkat 1, penyampaian pendapat mini fraksi, DPD RI, dan Pemerintah, serta pengambilan keputusan dan penandatanganan Draf 7 (tujuh) RUU tentang Provinsi.	Komisi II DPR RI bersama dengan DPD RI dan Pemerintah menyetujui dan menandatangani draf 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara).

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian PAN&RB dan BKN RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan undang-undang;</li> <li>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</li> <li>c. Kebijakan pemerintah.</li> </ul>	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua DPP Forum Pegawai Pemerintah Non-ASN, Ketua GTKHKNK 25+ Tendik Indonesia, Ketua FGHNLPSI PPPK Guru 2021, dan Kuasa Hukum Saudari Ningsih Sri Handayani, dengan agenda terkait tenaga honorer</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi II DPR RI memahami pentingnya Pemerintah untuk segera memastikan kecukupan alokasi anggaran penggajian bagi ASN PPPK yang lulus pada tahun 2019. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi jumlah formasi, jumlah ASN PPPK 2019, dan jumlah anggaran yang dibutuhkan.</li> <li>2. Komisi II DPR RI menganggap penting untuk segera membahas bersama Menteri PAN&amp;RB terkait posisi Tenaga Honorer yang telah dinyatakan lulus <i>passing grade</i> tapi belum mendapatkan formasi.</li> <li>3. Komisi II akan mendorong pemerintah untuk menindak dan mengantisipasi mafia ASN sehingga semua proses seleksi dan seluruh hasil rekrutmen ASN dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ul>



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Wakil Direktur Eksekutif PUSKAPOL LPPSP FISIP UI, Wakil Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI), dan Pimpinan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024, terkait Masukan terhadap proses seleksi FTP KPU RI dan BAWASLU	1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan-masukan terhadap proses seleksi FPT KPU RI dan Bawaslu RI. 2. Komisi II DPR RI menyetujui kegiatan FPT dapat disaksikan oleh masyarakat melalui kanal-kanal streaming yang tersedia. 3. Komisi II DPR RI akan mempertimbangkan 30% keterwakilan perempuan.
2.	Kementerian ATR/BPN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan agenda evaluasi penanganan permasalahan pertanahan (rapat lanjutan tanggal 18 Januari 2022)	1. Komisi II DPR RI dapat menerima penyampaian realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN RI tahun 2021 sebesar 90,76% dan meminta Kementerian ATR/BPN RI meningkatkan kinerjanya agar tingkat penyerapan anggaran tahun 2022 dapat lebih dioptimalkan. 2. Terkait dengan hasil penanganan kasus pertanahan, dimana dalam penjelasan Kementerian ATR/BPN RI mengenai target penanganan kasus sebanyak

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>8.111 kasus, namun hanya dapat diselesaikan sejumlah 1.591 kasus, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI untuk lebih meningkatkan kinerja terhadap penyelesaian dan penanganan konflik dan sengketa pertanahan.</p> <p>3. Terhadap penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan, Komisi II DPR RI meminta kepada Menteri ATR/BPN RI melakukan beberapa hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sinkronisasi data terkait proses penyelesaian konflik dan sengketa agar tidak terjadi tumpang tindih data pada proses penerbitan sertifikat hak atas tanah.</li> <li>b. Meningkatkan target dan realisasi penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan seluruh provinsi, kabupaten dan kota.</li> <li>c. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Kepolisian dan Kejaksaan agar penyelesaian mafia tanah</li> </ul>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dalam melakukan penanganan kasus pertanahan berpihak pada rakyat dan konstitusi, keadilan, dan kemakmuran.</p> <p>4. Untuk mencukupi ketersediaan cadangan tanah untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria, Komisi II DPR RI mendorong percepatan pengelolaan Bank Tanah dan meminta agar dalam operasional pengelolaan Badan Bank Tanah, memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perolehan tanah, pengelolaan tanah dan pemanfaatan tanah</li> <li>b. Pengidentifikasian dan penertiban administrasi pertanahan atas aset Bank Tanah</li> <li>c. Kesesuaian perencanaan tata ruang</li> </ul> <p>5. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk segera mengajukan kepada</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>Presiden terkait pembentukan Panitia Seleksi Dewan Pengawas Badan Bank Tanah.</p> <p>6. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN RI segera membangun komunikasi intensif kepada Ketua MA untuk menempatkan hakim <i>Adhoc</i> pertanahan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.</p> <p>7. Terkait dengan irisan kewenangan Kementerian ATR/BPN RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengenai hak-hak atas tanah masyarakat yang menjadi kawasan hutan, penguasaan tanah oleh masyarakat dalam kawasan hutan, tanah instansi Pemerintah dalam kawasan hutan, dan hak atas tanah yang masuk dalam kebijakan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB), Komisi II DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI untuk melaksanakan rapat gabungan</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>dengan Kementerian KLHK bersama dengan Kementerian ATR/BPN RI.</p> <p>8. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN meninjau ulang Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta melindungi masyarakat dari praktek mafia pertanahan.</p> <p>9. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN sepakat untuk mengikutsertakan Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan program Kementerian ATR/BPN di daerah pemilihan masing-masing.</p>
3.	Seluruh Mitra Kerja Komisi II DPR RI	<p>a. Pelaksanaan undang-undang;</p> <p>b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau</p> <p>c. Kebijakan pemerintah.</p>	Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kepulauan Riau	Dalam rangka melaksanakan Reses DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022

#### D. TUGAS KHUSUS

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KPU RI dan Bawalsu RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas keputusan berdasarkan mufakat;</li> <li>b. Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar;</li> <li>c. Persetujuan pemindahtanganan asset negara;</li> <li>d. Persetujuan perjanjian internasional yang berdampak luas;</li> <li>e. Pemilihan anggota BPK;</li> <li>f. Penegakan kode etik;</li> <li>g. Kerja sama antar parlemen;</li> <li>h. Akuntabilitas keuangan;</li> <li>i. Kerumahtanggaan DPR RI;</li> <li>j. Lain-lain.</li> </ul>	<p><i>Fit and Proper Test</i> Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan 2022-2027</p>	<p>Komis II DPR RI telah melaksanakan <i>Fit and Proper Test</i> Calon Anggota KPU RI dan Bawaslu RI Masa Jabatan 2022-2027 pada tanggal 14-16 Februari 2022 dan menetapkan 7 Calon Anggota KPU RI terpilih dan 5 Calon Anggota Bawalsu terpilih, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi II DPR RI menyepakati urutan Calon Anggota KPU RI Masa Jabatan 2022-2027 dan menetapkan 7 (tujuh) Anggota KPU RI Masa Jabatan 2022-2027, sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Betty Epsilon Idroos</li> <li>2) Hasyim Asy'ari</li> <li>3) Mochammad Afifuddin</li> <li>4) Parsadaan Harahap</li> <li>5) Yulianto Sudrajat</li> <li>6) Idham Holik</li> </ol> </li> </ol>

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>7) August Mellaz  8) Viryan  9) Iffa Rosita  10) Dahliah  11) I Dewa Kade Wiarsa  Raka Sandi  12) Iwan Rompo Banne  13) Yessy Yatty  Momongan  14) Muchamad Ali Safa'at</p> <p>2. Komisi II DPR RI  menyepakati urutan  Calon Anggota Bawaslu  RI Masa Jabatan 2022-  2027 dan menetapkan 5  (lima) Anggota Bawaslu  RI Masa Jabatan 2022-  2027, sebagai berikut:</p> <p>1) Lolly Suhenty  2) Puadi  3) Rahmat Bagja  4) Totok Haryono  5) Herwyn Jefler Hielsa  Malonda  6) Subair  7) Fritz Edward Siregar  8) Aditya Perdana  9) Mardiana Rusli  10) Andi Tenri Somba</p>

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>RUU tentang Hukum Acara Perdata</b>	Pembahasan Tk. I	Rapat Kerja Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM RI pada tanggal 16 Februari 2022, membahas: 1. Penjelasan Pemerintah atas RUU tentang Hk Acara Perdata; 2. Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang Hk Acara Perdata; 3. Membahas jadwal dan rencana kerja pembahasan RUU tentang Hk Acara Perdata; 4. Penyerahan DIM RUU tentang Hk Acara Perdata;; 5. Pembahasan DIM; 6. Pembentukan Panja RUU tentang Hk Acara Perdata 7. Lain-lain	Keputusan Raker : 1. Menyetujui pembentukan Panja RUU tentang Hukum Acara Perdata. 2. Menyetujui Pembahasan RUU tentang Hukum Acara Perdata dilaksanakan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022. 3. Menyetujui Ketua Panja RUU tentang Hukum Acara Perdata adalah Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum.



NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	<b>RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</b>	Pembahasan Tk. I	<p>1. Pimpinan DPR RI menerima Surpres Nomor R-02/Pres/01/2022 tanggal 14 Januari 2022, perihal RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Presiden menugaskan Menkumham, Menkes, Menpan RB mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU ttg Perubahan Kedua atas UU tentang Narkotika</p> <p>2. Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 3 Februari 2022 dan berdasarkan Surpres diatas, maka Pimpinan DPR RI menugaskan Komisi III DPR RI untuk membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Narkotika.</p>	Sejak menerima Surat Penugasan sampai dengan penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 tanggal 18 Februari 2022, Komisi III DPR RI belum melakukan pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

## C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<p>1. Gubernur Jawa Tengah</p> <p>2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah</p> <p>3. Pangdam IV/Diponegoro</p> <p>4. Kakanwil BPN</p>	Kunjungan Kerja Spesifik	Pengawasan penegakan hukum terkait dengan pengamanan kegiatan di wilayah Proyek Strategis Nasional Bendungan	<p>1. Dilaksanakan pada hari Kamis sd Sabtu, tanggal 10 sd 12 Februari 2022.</p> <p>2. Kunspek ke Desa Wadas Bener, Purworejo Jawa</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Balai Besar Wilayah Sungai Sungai Opak (BBWS SO) 6. Unsur Masyarakat/Lembaga Bantuan Hukum		Bener, Desa Wadas Bener, Purworejo, Jawa Tengah.	Tengah, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.. 3. Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.
2.	<b>LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)</b>	Rapat Kerja	Membahas: 1. Evaluasi kinerja ditahun 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp.77.380.574.000,-, kendala yang dihadapi dan upaya membangun kerja sama yang sinergis dan harmonis. 2. <i>Roadmap</i> Tahun 2022, program prioritas, dan strategi dalam pencapaiannya, dengan pagu anggaran sebesar Rp.152.595.374.000,- 3. Tindak lanjut atas Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 September 2021.	1. Raker dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. Pelaksanaan tanggal 14 Februari 2022, Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. Raker dihadiri oleh Kepala LPSK & jajaran. 4. <u>Kesimpulan:</u> 1) Komisi III DPR RI menerima capaian kinerja LPSK pada tahun 2021 dan mendukung Rencana Kerja dan Program Prioritas LPSK di tahun 2022 serta akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pencapaiannya.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>2) Komisi III DPR RI meminta LPSK untuk memprioritaskan Program Layanan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak serta Program Perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas Sahabat Saksi dan Korban (SSK).</p> <p>3) Komisi III DPR RI meminta LPSK untuk meningkatkan kapasitas SDM dan penambahan jumlah SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK.</p> <p>4) Komisi III DPR RI mendukung upaya LPSK dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi korban tindak pidana melalui sinergisitas</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
				<p>dengan seluruh institusi penegak hukum.</p> <p>5) Komisi III DPR RI berkomitmen untuk mendukung anggaran yang dibutuhkan LPSK dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam program prioritasnya.</p>
3.	<b>PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI III DPR RI</b>	Rapat Intern	<p>Membahas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak lanjut dari Kunjungan Spesifik ke Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah</li> <li>2. Lain-lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Intern Bersifat <b>TERTUTUP</b></li> <li>2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.</li> <li>3. Dihadiri oleh Anggota Tim Kunspek Jawa Tengah.</li> </ol>
4.	<b>KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGAH</b>	Kunjungan Kerja Spesifik	<p>Pengawasan penegakan hukum terhadap kericuhan yang terjadi terkait dengan pembangunan tambang emas yang dilakukan oleh PT. Trio Kencana di Parigo Moutong Sulawesi Tengah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan pada hari Kamis sd Sabtu, tanggal 16 sd 18 Februari 2022.</li> <li>2. Kunspek ke Sulawesi Tengah, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Bp. Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M.</li> <li>3. Anggota Tim berdasarkan proporsional komposisi fraksi.</li> </ol>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	1. Kepala Kepolisian Daerah 2. Kepala Kejaksaan Tinggi 3. Kepala BNN Provinsi 4. Ketua Pengadilan Tinggi 5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama 6. Ketua Pengadilan TUN 7. Ketua Pengadilan Militer	Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022	Komisi III DPR RI akan melaksanakan Kunker Reses ke 3 (tiga) daerah, yaitu: 1. Provinsi Kalteng, tanggal 21 sd 25 Februari 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. Desmond Mahesa Junaidi, S.H., M.H. 2. Provinsi Kaltara, tanggal 21 sd 25 Februari 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. 3. Provinsi Sumatera Utara, tanggal 24 sd 28 Februari 2022, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom.	---

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pertanian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; a. Kebijakan Pemerintah	a. Automatic Adjustment Belanja Kementerian Pertanian TA 2022; b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022; dan a. Lain-lain.	
2.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (13 Eselon 1) serta Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Automatic Adjustment Belanja Kementerian LHK dan BRGM TA 2022; b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022; dan c. Lain-lain	
3.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Automatic Adjustment Belanja Kementerian LHK dan BRGM TA 2022; b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022;	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			c. Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; serta d. Data Kebun dan pertambangan dalam kawasan hutan.	
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan (9 Eselon 1)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; b. Kebijakan Pemerintah	a. Automatic Adjustment Belanja Kementerian Kelautan dan PerikananTA 2022; b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022; dan c. Lain-lain	
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Automatic Adjustment Belanja Kementerian Pertanian TA 2022; b. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022; dan d. Lain-lain.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<b>DIRJEN PERKERETAAPIAN DAN DIRUT PT KCIC KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>	RDP tgl. 7 Feb. 2022; Dengan agenda: Membahas progres pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung;	1. RDP dilaksanakan secara fisik & virtual. 2. <u>Kesimpulan:</u> 1) Komisi V DPR RI memahami penjelasan Dirjen Perkeretaapian dan Direktur PT. KCIC terkait dengan progres Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian dan PT. KCIC untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung. 2) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk menyelesaikan permasalahan dan	



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>kendala teknis serta dampak pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.</p> <p>3) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk memperjelas status kepemilikan dari struktur permodalan pasca perubahan postur anggaran dalam penyelenggaraan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk selalu memprioritaskan keselamatan kerja dan ketaatan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung.</p> <p>5) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk melibatkan lebih banyak porsi kepada penyedia jasa lokal dalam</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pembangunan Kereta Cepat Jakarta – Bandung.</p> <p>6) Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT. KCIC untuk segera menyelesaikan review terhadap dokumen perencanaan (<i>feasibility study</i>) sebagai bahan untuk menjalankan fungsi pengawasan.</p>	
2.	<b>BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA</b>	<p>RDP dengan Para Deputi BMKG tgl 8 Feb 2022; Dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021 masing-masing Deputi BMKG;</li> <li>2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 masing-masing Deputi BMKG;</li> <li>3. Lain-lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RDP dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>2. <u>Kesimpulan</u>: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Deputi BMKG, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021;</li> <li>2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Deputi BMKG agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022;</li> <li>3) Komisi V DPR RI dan BMKG sepakat untuk melakukan</li> </ol> </li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pendalaman secara khusus terkait dengan perencanaan dan proses pengadaan MMS-2.</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta Deputi Meteorologi; Deputi Klimatologi; Deputi Geofisika; dan Deputi Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa dan Jaringan Komunikasi agar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan koordinasi internal dengan setiap Unit Organisasi Eselon I;</li> <li>b. Meningkatkan perencanaan yang lebih akurat dan menguatkan upaya untuk mempertahankan perencanaan khususnya dalam penerapan pengadaan barang dan jasa;</li> <li>c. Memperbanyak program/kegiatan berbasis masyarakat;</li> <li>d. Memperbanyak sebaran alat deteksi tsunami terutama di daerah rawan bencana.</li> </ul>	
3.	<b>DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT, BPTJ, DAN DIRJEN PERKERETAAPIAN</b>	RDP dgn Dirjen Hubdat, BPTJ, dan Dirjen Perkeretaapian, tgl 9 Feb 2022 Dengan agenda:	<p>1. RDP dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</p> <p>2. <u>Kesimpulan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	<b>KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021;</li> <li>2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 masing-masing unit Eselon I Kementerian Perhubungan;</li> <li>3. Lain-lain</li> </ol>	<p>Hubdat, BPTJ, dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021;</p> <p>2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Hubdat, BPTJ, dan Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022;</p> <p>3) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kementerian Perhubungan untuk melaporkan secara lebih detail terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Komisi V DPR RI.</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perkeretaapian dan BPTJ Kementerian Perhubungan untuk:</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. Meningkatkan SDM pengawas dan membuat skema pengawasan berbasis teknologi, terhadap kendaraan <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL);</p> <p>b. Meningkatkan koordinasi internal dengan setiap Unit Organisasi Eselon I sehingga lebih berperan dalam penetapan kebijakan strategis untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan kualitas layanan transportasi.</p>	
4.	<b>KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK PENGAWASAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>	<p>Kunfik tgl 10 s.d 12 Feb 22 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meninjau pembangunan/ Revitalisasi Terminal Harjamukti Cirebon</li> <li>- Meninjau Pelabuhan Bojonegara, Serang, Banten</li> <li>- Meninjau pembangunan Double Trak dan stasiun Rancaekek, Bandung</li> </ul>	<p>a. Peninjauan Terminal Type A Harjamukti, Cirebon, Komisi V DPR RI meminta agar proses percepatan pembangunan revitalisasi terminal Harjamukti kota Cirebon perlu didorong sehingga kehadirannya dapat segera dimanfaatkan oleh para masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dengan bus atau angkutan umum serta memperhatikan ketersediaan fasilitas pendukung pada area kedatangan dan keberangkatan bus dengan memperhatikan kenyamanan pengguna.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Peninjauan Pelabuhan Bojonegara, Serang, Banten, Komisi V DPR RI melakukan pertemuan dengan Ditjen Perhubungan Laut dan Pelindo untuk membahas permasalahan yang ada, seperti masalah pembebasan lahan dan pemanfaatan pelabuhan yang belum optimal.</p> <p>c. Peninjauan pembangunan double trak dan stasiun Rancaekek yang nantinya akan berfungsi sebagai sarana penunjang mobilitas angkutan penumpang dan barang. Melalui Kunker ini melihat secara langsung permasalahan dan menginventarisir untuk dapat ditindaklanjuti.</p>	
5.	<p><b>DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT DAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</b></p>	<p>Rapat Dengar Pendapat tgl. 14 Feb 2022; Dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021;</li> <li>2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 untuk masing-</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RDP dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>2. <u>Kesimpulan:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen Hubla dan Ditjen Hubud Kementerian Perhubungan, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021;</li> </ol> </li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<p>masing Unit Eselon I Kemen Perhubungan; 3. Lain-lain.</p>	<p>2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Hubla dan Ditjen Hubud Kementerian Perhubungan agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022;</p> <p>3) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan melaporkannya secara detail kepada Komisi V DPR RI.</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Udara untuk melaporkan perkembangan MoU Penyesuaian <i>Flight Information Region</i> (FIR) kepada Komisi V DPR RI.</p> <p>5) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perhubungan Laut dan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan untuk:</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan program padat karya dengan melibatkan masyarakat setempat;</li> <li>b. melengkapi fasilitas rambu-rambu pada alur pelayaran;</li> <li>c. mengedepankan kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap tingginya angka kecelakaan yang diakibatkan oleh gelombang dan cuaca ekstrim;</li> <li>d. mempercepat tindak lanjut atas hasil rekomendasi KNKT dalam meningkatkan keselamatan transportasi.</li> <li>e. mengevaluasi program tol laut dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.</li> <li>f. percepatan penyelesaian pengadaan lahan untuk pembangunan serta pengembangan pelabuhan dan bandara.</li> </ul>	
6.	<b>DIRJEN BINA MARGA, DIRJEN SUMBER DAYA AIR, DIRJEN BINA KONSTRUKSI, PENGURUS LPJK KEMENTERIAN PUPR</b>	Rapat Dengar Pendapat tgl. 15 Feb 2022; Dengan agenda:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RDP dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>2. <u>Kesimpulan:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air,</li> </ol> </li> </ol>	



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021;</li> <li>2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 untuk masing-masing Unit Eselon I Kementerian PUPR</li> <li>3. Lain-lain.</li> </ol>	<p>dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021;</p> <p>2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR agar permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022;</p> <p>3) Komisi V DPR RI mendesak Ditjen Bina Marga dan Ditjen Sumber Daya Air untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan segera menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksanaannya.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Konstruksi untuk melakukan komunikasi secara intens dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dalam meningkatkan fungsi dan peran LPJK terkait pengembangan jasa konstruksi.</p> <p>5) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menambah program padat karya dengan memanfaatkan sisa lelang TA 2022;</li> <li>b. mempercepat penyelesaian permasalahan lahan terkait dengan pembangunan bendungan maupun pada pembangunan jalan;</li> <li>c. melakukan evaluasi terhadap penawaran harga tidak wajar yang menyebabkan persaingan tidak sehat dalam penyediaan jasa konstruksi.</li> </ul> <p>6) Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat untuk membahas lebih khusus terkait</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>penyelenggaraan jasa konstruksi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan instansi terkait lainnya.</p> <p>7) Komisi V DPR RI mendesak Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian permasalahan di Desa Wadas Kabupaten Purworejo terkait dengan pembangunan Bendungan Bener sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
7.	<p><b>DIRJEN CIPTA KARYA, DIRJEN PERUMAHAN, DIRJEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR, DAN KEPALA BPIW KEMENTERIAN PUPR</b></p>	<p>Rapat Dengar Pendapat tgl. 16 Feb 2022; Dengan agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2021;</li> <li>2. Membahas program Kerja Tahun Anggaran 2022 untuk masing-masing Unit Eselon I Kementerian PUPR</li> <li>3. Lain-lain.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RDP dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</li> <li>2. <u>Kesimpulan:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terkait dengan evaluasi pelaksanaan anggaran Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, dan BPIW Kementerian PUPR, Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2021;</li> <li>2) Terhadap program/kegiatan di TA 2021 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur, dan BPIW Kementerian PUPR agar</li> </ol> </li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2021 dapat diselesaikan sehingga tidak terulang lagi pada TA 2022;</p> <p>3) Komisi V DPR RI meminta BPIW untuk melakukan evaluasi dan sinkronisasi data terkait kriteria penerima program pembangunan infrastruktur PUPR dalam penanganan kemiskinan ekstrim.</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR untuk :</p> <p>a. menambah program padat karya dengan memanfaatkan sisa lelang TA.2022;</p> <p>b. menyederhanakan administrasi serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pada program berbasis masyarakat.</p> <p>5) Komisi V DPR RI meminta Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, dan BPIW Kementerian PUPR untuk meningkatkan koordinasi antar Unit Organisasi Eselon I dalam rangka</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mendukung terintegrasinya perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.	
8.	<b>KEMENTERIAN PUPR, KEMENTERIAN PERHUBUNGAN, BMKG, BASARNAS, DAN KORLANTAS POLRI</b>	Raker dan RDP tgl 17 Februari 2022 dengan agenda membahas evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan mobilitas transportasi pada Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di masa Pandemi Covid-19	<p>1. Raker dan RDP dilaksanakan secara fisik &amp; virtual.</p> <p><u>2. Kesimpulan:</u></p> <p>1) Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, BNPP (Basarnas) dan Korlantas Polri sehubungan dengan kelancaran arus mudik dan arus balik Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 serta upaya pengendalian penyebaran Covid-19.</p> <p>2) Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan Korlantas Polri untuk meningkatkan upaya preventif terhadap hal-hal yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dan kemacetan baik berupa pemeriksaan kelaikan operasional kendaraan, <i>Over Dimension</i> dan <i>Over Loading</i> (ODOL) dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3) Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama operator layanan transportasi darat, laut, udara dan kereta api untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor, pengawasan dan deteksi dini dalam mempersiapkan langkah pengendalian virus Covid-19 pada angkutan massal dalam libur hari besar keagamaan yang akan datang.</p> <p>4) Komisi V DPR RI meminta BMKG untuk meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait diseminasi informasi dan meningkatkan sosialisasi peringatan dini khususnya potensi terjadinya bencana akibat cuaca ekstrim dan memastikan informasi sampai ke masyarakat.</p> <p>5) Komisi V DPR RI meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam penanganan kecelakaan dan bencana alam dengan menambah personil dan meningkatkan pelatihan SDM potensi SAR.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			6) Komisi V DPR RI meminta Korlantas Polri untuk meningkatkan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> lainnya dalam mengupayakan langkah-langkah konkrit untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Jasa Telemedicine Indonesia PT Alodokter Teknologi Solusi, PT Good Dokter Teknologi Indonesia, PT Media Dokter Investama, PT Media Komunika Teknologi, PT Sehat Harsana Emedika. Sementara pada RDPU kedua yang berlangsung sekitar pukul 2 siang menghadirkan Penyedia Jasa Telemedis PT. Pro Sehat Indonesia (Prosehat), PY. Yes Dok Indonesia (Yesdok), PT Milvik Indonesia (Milvik), PT Medika Nusantara Digital (Klinik Go), dan PT Link Medis Sehat (Link Sehat)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka menghadapi ancaman kenaikan Covid-19 varian Omicron, Komisi VI DPR RI memanggil sejumlah penyedia jasa telemedicine untuk menerima penjelasan dan aspirasi terkait kesiapan layanan telemedis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).</li> <li>2. RDPU ini berlangsung 2 gelombang di hari yang sama, Senin (7/2). Pada RDPU pertama yang dilangsungkan sekitar pukul 10 pagi menghadirkan Penyedia Jasa Telemedis PT Alodokter Teknologi Solusi, PT Good Dokter Teknologi Indonesia, PT Media Dokter Investama, PT Media Komunika Teknologi, PT Sehat</li> </ul>	<b>Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI Senin, 7 Februari 2022</b>



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Harsana Emedika. Sementara pada RDPU kedua yang berlangsung sekitar pukul 2 siang menghadirkan Penyedia Jasa Telemedis PT. Pro Sehat Indonesia (Prosehat), PY. Yes Dok Indonesia (Yesdok), PT Milvik Indonesia (Milvik), PT Medika Nusantara Digital (Klinik Go), dan PT Link Medis Sehat (Link Sehat) Pada pertemuan tersebut menghasilkan beberapa catatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Komisi VI DPR RI mengapresiasi telemedicine karena sudah membantu masyarakat dalam memberikan layanan kesehatan. Komisi VI DPR RI juga memastikan bahwa pelayanan telemedicine dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada</li> <li>b. Komisi VI DPR RI mengharapkan informasi terkait telemedicine dapat disosialisasikan dan disebarluaskan melalui berbagai media sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat.</li> <li>c. Serta Komisi VI DPR RI meminta Pemerintah agar memastikan bahwa 6 alur layanan telemedicine Covid 19 yang telah diatur oleh Kemenkes dapat diakses dengan baik.</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	PT PLN (Persero); MIND ID	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PLN Dan MIND ID Hadir Dalam Rapat Panja BUMN Energi. Rabu (9/2) Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI lakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN dan Direktur Pengembangan Usaha MIND ID dalam rangka membahas terkait transisi energi, kondisi energi primer, serta kesiapan perubahan kompor LPG menjadi kompor induksi.</li> <li>2. Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI mendapatkan penjelasan Direktur Utama PT PLN (Persero), mengenai transisi energi, kondisi energi primer dan kesiapan perubahan kompor LPG menjadi kompor Induksi yang dimasukkan ke dalam Road Map Karbon Netral untuk mewujudkan zero carbon emission di tahun 2060.</li> <li>3. Oleh karena itu, Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI mendukung langkah PLN dalam melakukan perubahan kompor listrik menjadi kompor induksi, sebagai bagian perwujudan masa depan Indonesia dengan energi bersih, serta mendukung transformasi PLN menjadi perusahaan listrik yang menghasilkan produk energi berkelanjutan.</li> </ol>	<p><b>Rapat Panja BUMN Energi, Rabu 9 Februari 2022</b></p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Selain itu, Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI juga mendapatkan penjelasan Direktur Pengembangan Usaha MIND ID, mengenai arah strategis Grup MIND ID Bidang Energi, termasuk antara lain transisi ke arah penggunaan Clean Energy, kontribusi EBT dalam bauran energi nasional yang terus mengalami kenaikan dan sikap Grup MIND ID dalam mendukung transisi energi, strategi dan program dekarbonisasi Grup MIND ID yang diterapkan kepada anggota holding MIND ID.</p>	
3.	PT Pertamina (Persero)	<p>a. Pelaksanaan Undang-Undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah</p>	<p>1. Dirut Pertamina Jelaskan Tentang Ketahanan Energi Nasional Kepada Komisi VI DPR RI 2. Rabu (9/2) Panja BUMN Energi Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan rapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dalam rangka membahas terkait ketahanan energy nasional, perkembangan proyek kilang Pertamina, serta rencana bauran energi baru terbarukan. 3. Dalam Rapat Panja BUMN Energi ini Komisi VI DPR RI mendapatkan penjelasan dari Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mengenai strategi</p>	<p><b>Rapat Panja BUMN Energi, Rabu 9 Februari 2022</b></p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>perusahaan dalam mendukung ketahanan energi nasional utamanya dengan cara penerapan Integrated Logistic End to End sebagai proses bisnis kunci (key business process) dari tahapan perencanaan, pola operasi hingga output untuk memastikan pola operasi crude, pola operasi BBM dan pola operasi LPG berjalan dengan baik.</p> <p>4. Dalam rapat Panja BUMN Energi tersebut Komisi VI DPR RI mendukung langkah Pertamina dalam upaya mewujudkan ketahanan energi yang lebih handal dan terus ditingkatkan dengan tolok ukur; 1) terjaminnya pemenuhan konsumsi energi meliputi konsumsi BBM domestik dan internasional produk kilang; 2) Pemenuhan pendanaan Cadangan Penunjang Energi (CPE) nasional pada umumnya dilakukan oleh Negara, dan dengan porsi kecil BUMN/Swasta, 3) Stock nasional menjadi 30 hari atau menuju maksimal capacity (tambahan stock sekitar 10 hari gasoline, gasoil, crude, LPG) ditanggung oleh negara dengan cost Inventory sekitar 2 (dua) milyar dollar dan dikelola/disimpan di tangki Pertamina.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi VI DPR RI pada tgl 10 s.d 12 Februari 2022 telah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Telkom Indonesia (Persero) dalam rangka peninjauan dan pembahasan pembangunan Hyperscale Data Center atau HDC. Kunjungan Kerja Spesifik ini dipimpin oleh M.Hekal selaku Pimpinan/Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan dihadiri oleh Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., Ririk Adriyanto, beserta jajaran dan jajaran direksi anak perusahaan PT Telkom Sigma.</li> <li>2. Dalam Kunjungan Spesifik tersebut Komisi VI DPR RI meminta kepada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Tbk untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia terkait Pembangunan data Center serta mempersiapkan aspek keamanan data konsumen dan melakukan sinergitas/kolaborasi dengan lembaga atau instansi Pemerintah.</li> </ol>	Kunjungan Kerja Spesifik 10-12 Februari 2022.

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senin (14/2) Komisi VI DPR RI lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk dalam rangka membahas tentang progress pelaksanaan PMN Tahun 2021 dan rencana PMN Tahun 2022.</li> <li>2. Dalam RDP tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong agar PMN Tahun 2021 yang telah diberikan dan PMN Tahun 2022 yang akan diterima PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya yaitu penyelesaian proyek jalan tol serta menyampaikan laporan perkembangannya kepada Komisi VI DPR RI secara berkala.</li> <li>3. Tidak hanya itu, Komisi VI DPR RI juga meminta PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada Komisi VI DPR RI antara lain laporan keuangan, hasil evaluasi right issue, business plan penugasan pemerintah yang tidak feasible untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN RI.</li> </ol>	<p>RDP Komisi VI DPR RI Dengan Waskita Karya terkait PMN Tahun 2021. Senin, 14 Februari 2022.</p>

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Acting Chairman Of Eurocham Indonesia, Ketua US-ASEAN Business Council (USABC) Jakarta Office, Director General Korea Trade - Investment Promotion Agency (KOTRA) Jakarta, dan Ketua The Jakarta Japan Club (JJC)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</li> <li>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</li> <li>c. Kebijakan Pemerintah</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi VI DPR RI Bahas Kondisi Investasi Bilateral dan Multilateral. Selasa (15/2) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan aspirasi dari Acting Chairman Of Eurocham Indonesia, Ketua US-ASEAN Business Council (USABC) Jakarta Office, Director General Korea Trade - Investment Promotion Agency (KOTRA) Jakarta, dan Ketua The Jakarta Japan Club (JJC) tentang kondisi investasi bilateral/multilateral dalam Rapat Dengar Pendapat Umum.</li> <li>2. Dalam RDPU tersebut, Komisi VI DPR RI mengapresiasi Eurocham Indonesia, US-ASEAN Business Council (USABC) Jakarta Office, Korea Trade - Investment Promotion Agency (KOTRA) Jakarta dan The Jakarta Japan Club (JJC) karena sudah membantu menciptakan iklim investasi bilateral/multilateral yang lebih baik.</li> <li>3. Komisi VI DPR RI juga mendorong kepada Eurocham Indonesia, US-ASEAN Business Council (USABC) Jakarta Office, Korea Trade - Investment Promotion Agency (KOTRA) Jakarta dan The Jakarta Japan Club (JJC) untuk</li> </ol>	RDPU Komisi VI DPR RI dengan Acting Chairman Of Eurocham Indonesia, Ketua US-ASEAN Business Council (USABC) Jakarta Office, Director General Korea Trade - Investment Promotion Agency (KOTRA) Jakarta, dan Ketua The Jakarta Japan Club (JJC). Selasa 15 Februari 2022

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>meningkatkan investasi di Indonesia yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan alih teknologi lebih baik di Indonesia.</p> <p>4. Beberapa catatan penting dari RDPU tersebut rencananya akan disampaikan kepada mitra kerja terkait melalui Rapat Kerja dengan Menteri Investasi, Menteri Perdagangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.</p>	
7.	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	<p>a. Pelaksanaan Undang-Undang;</p> <p>b. Pelaksanaan Keuangan Negara;</p> <p>c. Kebijakan Pemerintah</p>	<p>1. Komisi VI DPR RI Bentuk Panja Penyelamatan Garuda. Rabu (16/2). Dalam rangka upaya menyelamatkan PT Garuda Indonesia sebagai asset negara, Komisi VI DPR RI secara resmi membentuk Panja Penyelamatan Garuda. Panja ini dipimpin oleh Bapak Martin Manurung. Tanpa berlama-lama, di hari yang sama Panja Penyelamatan Garuda langsung memanggil Wamen BUMN II dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) untuk membahas kondisi terkini dan perkembangan proses restrukturisasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.</p> <p>2. Dalam rapat tersebut diputuskan Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI sepakat untuk menyelamatkan PT</p>	Rapat Internal Pembentukan Panja dilanjutkan dengan Rapat Kerja bersama Wakil Menteri BUMN II dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Rabu, 16 Februari 2022



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan akan terus mendalami semua opsi guna mendukung upaya penyelamatan tersebut. Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI juga meminta Kementerian BUMN untuk menyiapkan opsi-opsi lain yang memungkinkan kepemilikan nasional yang mayoritas dalam rangka Penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk diluar opsi-opsi yang telah dipaparkan dalam rapat hari ini.</p> <p>3. Tidak hanya itu, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI juga meminta agar PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk mempersiapkan business model yang memastikan Garuda dapat terus bertahan, dan selanjutnya disampaikan pada rapat berikutnya.</p>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Spesifik pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	Kunspek ke Provinsi Jawa Barat Peninjauan ke Tambanga Emas PT Antam, Tbk. di Kabupaten Bogor	
2.	a. Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian b. Direktur Utama PT Krakatau Steel	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Progress Smelter di Kalimantan Selatan b. Blast Furnace yang mangkrak c. Penjelasan terkait impor baja	
3.	a. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, b. Kepala SKK Migas, c. Direktur Utama PT Bumi Siak Pusako dan d. Direktur Utama Pertamina Hulu Energi	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Pencapaian dan kinerja industrihulu migas 2021 b. Investasi bidang eksplorasi 2021 dan prognosa 2022 c. Upaya untuk mengendalikan <i>capital outflow Chevron, Conoco Philips dan Shell</i>	

<b>NO</b>	<b>KEMENTERIAN/LEMBAGA</b>	<b>OBJEK PENGAWASAN</b>	<b>INFO SINGKAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
5.	Direktur Utama MIND ID dengan menghadirkan Sub Holding	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Evaluasi Kinerja Tahun 2021 b. Program Strategis Tahun 2022	
6.	Menteri ESDM RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan Keuangan Negara; c. Kebijakan Pemerintah	a. Penyampaian Laporan Hasil Kegiatan Panja Peningkatan Pendapatan Negara Sektor ESDM dan Perindustrian (Panja PPN) Komisi VII DPR RI Sub Sektor Batubara b. Update pelaksanaan DMO c. Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022 d. Persiapan Forum Transisi Energi G-20	
7.	Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan pemerintah	a. Provinsi Palembang Peninjauan ke PT Pupuk Sriwijaya dan Pertamina RU III Plaju, Palembang b. Provinsi Banten Peninjauan ke PT Indofood Sukses Makmur Tbk - Divisi Bogasari dan PT. Mayora Indah Jatake 2 Kota Tangerang c. Provinsi Jawa Timur Peninjauan ke PT Kebun Tebu Mas Lamongan	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Penanggulangan Bencana	Rapat Internal Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana	Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana memutuskan untuk menghentikan pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana karena tak kunjung ada kesepakatan dengan Panja Pemerintah mengenai nomenklatur kelembagaan penanggulangan bencana. Panja Komisi VIII DPR RI berpegang teguh pada RUU tentang Penanggulangan Bencana yang merupakan usul inisiatif DPR RI bahwa nomenklatur kelembagaan penanggulangan bencana disebutkan secara eksplisit dan rigid yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebaliknya Panja Pemerintah berkukuh pada Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU	DIM RUU Penanggulangan Bencana telah dibahas sebanyak 8 kali masa persidangan, mulai dari Masa Persidangan I, II, III, IV dan V Tahun Sidang 2020-2021 sampai Masa Persidangan I, II dan III Tahun Sidang 2021-2022

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Penanggulangan Bencana bahwa nomenklatur kelembagaan penanggulangan bencana cukup disebutkan dengan Badan. Karena tak kunjung ada kesepakatan mengenai nomenklatur kelembagaan ini, maka Panja Komisi VIII DPR RI memutuskan untuk menghentikan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dan akan dilaporkan dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dan lima Menteri pemegang Surpres lainnya.</p>	

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Agama RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama RI mengenai penyampaian usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1443 H/2022 M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menteri Agama RI mengusulkan kepada Komisi VIII DPR RI agar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji rata-rata menjadi sebesar Rp45juta per jamaah mengingat semakin</li> </ul>	Kepastian mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M masih menunggu

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tingginya BPIH Tahun 1443 H/2022 M atau sekitar Rp89,2 per jamaah meliputi biaya penerbangan, biaya hidup (living cost), biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya visa, serta biaya PCR baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menyajikan data-data pendukung yang rasional untuk memperkuat asumsi dasar dari usulan peningkatan Biph tersebut.</li> <li>• Komisi VIII DPR RI akan melakukan pembahasan BPIH Tahun 1443 H/2022 M pada Masa Reses jika terdapat informasi terkini dari Kementerian Agama mengenai kuota haji dengan izin dari Pimpinan DPR RI.</li> </ul>	<p>konfirmasi dari Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi</p>

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Baznas dan BWI	Evaluasi Pengelolaan Zakat dan Wakaf tahun 2021 dan Rencana Pengelolaan Zakat dan Wakaf tahun 2022.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi pengumpulan Zakat, Infaq, Sodaqah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DKSL) tahun 2021 sebesar Rp14 Triliun.</li> <li>• Target pengumpulan ZIS-DKSL tahun 2022 sebesar Rp15 Triliun.</li> <li>• Realisasi pengumpulan wakaf uang oleh BWI Periode 2018-2021 sebesar Rp855 Miliar.</li> </ul>	
2.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Padang (Sumbar), Palembang (Sumsel) dan Makassar (Sulsel)	Kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan sosial dan penyelenggaraan pendidikan keagamaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa upaya kesiapsiagaan bencana perlu terus dilakukan untuk meminimalisir jumlah korban jiwa dan harta apabila terjadi bencana di tengah tingginya intensitas hujan belakangan ini.</li> <li>• Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat prasejahtera dan masyarakat yang terdampak</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Covid-19 benar-benar tepat sasaran.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Komisi VIII DPR RI ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan di tengah tingginya penyebaran varian baru Omicron dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan cluster baru.</li></ul>	



## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KET
1.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	Panja mengadakan Kunjungan Kerja ke Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, tanggal 10-12 Februari 2022	Agenda utama kunjungan kerja Panja adalah untuk mendapatkan masukan konkrit bagi substansi yang diatur di dalam RUU POM dari Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan yang akan menjadi bahan Panja memfinalisasi draft RUU POM	Panja akan melakukan pembahasan draft RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan pada Masa Persidangan III -IV TS 2021-2022.

### B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian/Lembaga	Rapat pembahasan rencana kerja dan anggaran.	Tidak ada	....
2.	Badan Anggaran	a. Pembahasan alokasi anggaran kementerian/lembaga; b. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.	Tidak ada	.... ....

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan POM RI, tanggal 7 Februari 2022 yang kemudian dilanjutkan pada tanggal 14 Februari 2022	Pembahasan Program Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk membenahi struktur organisasi Badan POM RI dan percepatan reformasi birokrasi, khususnya segera menetapkan pejabat definitif untuk posisi eselon I dan eselon II yang masih kosong dan menyampaikan laporan secara berkala proses penetapannya ke Komisi IX DPR RI.</li> <li>2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI mendukung pengembangan industri obat dan obat tradisional dalam negeri dengan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dan koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.</li> <li>3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI secara serius memperkuat fungsi inteligen dan penyidikan sebagaimana amanat Peraturan</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, termasuk peningkatan kapasitas dan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM RI.</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk mengintensifkan pengawasan peredaran obat dan makanan secara online melalui penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang dilengkapi dengan investigasi dan forensik digital.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui penguatan strategi komunikasi dalam pelaksanaan KIE dan pemberdayaan komunitas.</p> <p>6. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI segera menyampaikan laporan kinerja tahun 2021 dan rencana tahun 2022 secara detail kepada Komisi IX DPR RI yang dilengkapi dengan data sebagai berikut:</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>a. data registrasi obat dan makanan;</p> <p>b. Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman berbasis komunitas</p> <p>c. Program orang tua angkat UMK pangan olahan; dan</p> <p>d. Sebaran Loka POM dan Pos POM</p> <p>7. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis terhadap pertanyaan anggota Komisi IX DPR RI pada Rapat Dengar Pendapat tanggal 7 Februari dan diserahkan paling lambat tanggal 17 Februari 2022.</p>	
2.	Rapat Internal Panja Pengawasan Vaksin Covid-19	Membahas TOR dan rencana kerja vaksin	Panja Pengawasan Vaksin Covid-19 Komisi IX DPR RI akan segera mulai melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati.	
3.	Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BP2MI Tanggal 14 dan 15 Februari 2022	<p>1. Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Perencanaan Program Tahun 2022;</p> <p>2. Penyelesaian perjanjian kerja terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri;</p> <p>3. Isu-isu terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p>	<p>1. Komisi IX DPR RI mengapresiasi penjelasan dan capaian kinerja Tahun 2021 dengan realisasi anggaran yang mencapai 98% dengan nominal Rp.312.785.857.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dari Pagu Anggaran sebesar Rp.316.986.895.000,- (Tiga Ratus</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)</p> <p>2. Komisi IX DPR RI akan memperjuangkan Anggaran BP2MI Tahun 2022 sebesar Rp.320.845.477.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan Usulan Kebutuhan Anggaran TA 2022 melalui Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp.241.035.804.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Ribu Rupiah) sehingga total anggaran BP2MI TA 2022 menjadi sebesar Rp.561.881.281.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)</p> <p>3. Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah melakukan percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran dan Awak</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Kapal Niaga Migran demi memberikan perlindungan yang optimal bagi PMI Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan sebagaimana amanat Ul-J No.18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).</p> <p>4. Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI segera melakukan Revisi Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan usulan anggota, termasuk klausul perlunya ijin dari suami, istri, orang tua atau wali dan kewajiban melampirkan ijin tertulis dari kelurahan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja bagi PMI di negara penempatan.</p> <p>5. Komisi IX DPR RI mendesak BP2MI untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan kemudahan dan penyelesaian perpanjangan kontrak kerja PMI di negara penempatan</li> <li>b. melakukan terobosan dan langkah strategis terhadap upaya</li> </ul>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pemulangan PMI yang di deportasi dari Malaysia</p> <p>c. mempercepat pembaharuan MOU dengan Malaysia dalam rangka penguatan perlindungan PMI</p> <p>d. melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam rangka penyelesaian MOU pada negara yang tidak ada, sudah habis masa berlaku dan belum melakukan perpanjangan, serta penyesuaian MOU sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)</p> <p>6. Komisi IX DPR RI meminta BP2MI untuk menyampaikan hasil investigasi yang telah dilakukan Oleh Satgas Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI</p> <p>7. Komisi IX DPR RI mengagendakan pembentukan Panitia Kerja Pemberantasan Sindikat Pengiriman Ilegal PMI ke luar negeri</p> <p>8. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan anggota Komisi IX DPR RI pada RDP hari ini, paling lambat Selasa, 22 Februari 2022</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
4.	Menerima Audiensi DPP Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP FSP LEM SPSI) tanggal 16 Februari 2022	Audiensi terkait polemik Permenaker 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Program JHT.	<p>Catatan Serap Aspirasi:</p> <p>1. Batalkan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Mencabut Cluster Ketenagakerjaan dari UU Ciptaker).</p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat, dan salah satu alasan terpenting yang disampaikan oleh perwakilan Serikat Pekerja adalah UU tersebut melanggar Azas dalam pembentukan undang-undang, dengan demikian, perbaikan undang-undang ini harus dimulai dari awal seperti pembuatan/pembentukan undang-undang baru dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait. Dalam kluster Ketenagakerjaan, perwakilan serikat pekerja berasumsi “selain telah melakukan pelanggaran formil, secara materi/substansi juga terdapat banyak masalah hal ini karena di mulai dari perencanaan dan pembuatan draft RUU, serikat pekerja tidak dilibatkan, hal inilah</p>	



NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>yang kemudian dinyatakan melanggar azas keterbukaan”. Berdasarkan hal itulah, Serikat Pekerja meminta untuk mengeluarkan klaster Ketenagakerjaan dari UU Nonor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena merupakan ranah perlindungan. Mengingat terdapat perbedaan perlakuan antara pekerja dan pemilik perusahaan (investor), dimana tenaga kerja adalah masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dari negara, karena tenaga kerja tidak mempunyai posisi tawar yang baik, dedangkan pemilimm perusahaan (investor) telatif tidak membutuhkan perlindungan negara, terutama dalam hal hubungan kerja.</p> <p>2. Tolak Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-udangan. Serikat Pekerja berasumsi dengan telah di setuju dalam Rapat Paripurna pada Selasa, 8 Februari 2022 yang lalu dengan agenda Rencana Revisi UU Nomor 12 Tahun</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) sebagai usul DPR RI. "Hal ini jelas-jelas sebagai upaya untuk melegitimasi UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Dan SP juga mengambil kesimpulan bahwa DPR RI telah mengabaikan aspirasi masyarakat khususnya pekerja/buruh yang telah menggugat UU tersebut ke MK melalui yudisial review, dan MK telah menyatakan secara jelas oleh MK".</p> <p>Serikat Pekerja meminta DPR RI untuk mengulangi seluruh proses pembentukan UU nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tersebut dari awal dengan memulai proses yang benar dan fair sesuai dengan putusan MK yang di anggap melanggar yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melanggar Azaz</li> <li>b. Melanggar tata cara dan format penulisan</li> </ol>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>c. Terlalu banyak perubahan-perubahan setelah di sahkan Atas dasar tersebutlah serikat pekerja meminta agar DPR RI wajib memulai dengan menyesuaikan azaz, dan tata cara dan format penulisan UU Nomor 11 Tahun 2020 tersebut, bukan langsung melakukan revisi untuk menyesuaikan UU nomor 12 tahun 2012 tentang PPP.</p> <p>Serikat Pekerja juga meminta kepada DPR RI untuk memberikan peringatan kepada pemerintah guna menghormati Putusan MK dengan memerintahkan untuk menunda/ menanggihkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan juga menegur pemerintah yang tidak mentaati Putusan MK yang masih menggunakan PP nomor 36 Tahun 2021 tentang Upah Minimum, dalam hal ini SP berasumsi bahwa Keputusan MK pada dikti 7 yang memerintahkan untuk menunda/ menanggihkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Mendesak Menaker mencabut Permenaker Nomo 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.</p> <p>Filosofi dari Jaminan Hari Tua menurut Serikat Pekerja adalah Menjadi Hidup sampai Tua.</p> <p>Aturan terbaru terkait Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi sorotan publik karena baru bisa dicairkan setelah usia peserta BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 56 tahun. Sejumlah tuntutan mencabut aturan JHT itu mengalir deras. Jadi untuk bicara seperti ini, kan asumsinya dalam regulasi itu untuk batas usia pensiun kan. Sementara itu, klaim JHT dapat diambil untuk persiapan masa pensiun dengan ketentuan telah memenuhi masa kepesertaan. Jadi, kalau sudah 10 tahun pun, sudah bisa diklaim. Meski begitu masih banyak yang tidak setuju terkait hal itu.</p> <p>Serikat Pekerja menuntut agar Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Jaminan Hari Tua atau JHT yang bisa di ambil pada saat umur 56 Tahun. Tidak semua orang atau buruh di PHK mendapatkan pesangon. Maka dari ini kami kesini meminta kepada DPR RI untuk mengevaluasi Permenaker yang telah dikeluarkan oleh Menteri Ketenagaakerjaan yaitu No. 2 Tahun 2022.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor ... Tahun ...tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional	RDP Panja dan Rapat Kerja dengan K/L yang ditunjuk Surpres.	<p>1. Konsinyering dalam rangka pembahasan RUU dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 26 Januari 2022, 2 s/d 4 Februari 2022, tanggal 7 s/d 10 Februari 2022. Rapat Timus/Timsin dilaksanakan tanggal 11 s/d 12 Februari 2022.</p> <p>2. Rapat Kerja dengan K/L yang ditunjuk Surpres dilaksanakan tanggal 14 Februari 2022, dengan keputusan antara lain: menyetujui RUU merupakan pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dengan judul RUU tentang Keolahragaan.</p>	
2.	RUU tentang Praktik Psikologi	RDP dalam bentuk konsinyering.	Panja RUU Praktik Psikologi dengan Panja Pemerintah melakukan beberapa kali konsinyering untuk membahas substansi dan norma terkait bab surat tanda registrasi dan bab layanan psikologi.	

**B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN**

-

**C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN**

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemendikbudristek RI	RDP/RDPU Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)  (27 Januari, 2 Februari dan 10 Februari 2022)	<p>1. Beberapa RDP/RDPU yang dilaksanakan Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kegiatan akhir sebelum Panja MBKM ditutup. RDP dengan beberapa K/L yang bertujuan untuk mengetahui pandangan K/L terkait lain terhadap program MBKM dan koordinasi implementasi kebijakan MBKM. RDPU dengan BEM Indonesia, yang bertujuan untuk mengetahui Pandangan dan Tanggapan terhadap Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dalam Perspektif Mahasiswa. RDP dengan K/L pengampu kebijakan perencanaan pembangunan dan keuangan negara, yang bertujuan untuk mengetahui skema pembiayaan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.</p> <p>2. Pada tanggal 17 Februari 2022, Panja MBKM menutup kegiatannya melalui Rapat Intern Panja dengan memberikan catatan terhadap konsep kesimpulan dan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan.</p>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		RDP dengan Eselon I Kemendikbudristek RI	Pembahasan tindak lanjut keputusan Raker/RDP dan Panja-Panja Bidang Pendidikan.	
		Rapat Intern Komisi 1. Laporan Panja MBKM Komisi X DPR RI 2. Laporan Panja RUU Praktik Psikologi Komisi X DPR RI 3. Rencana Kunker Reses Komisi X DPR RI pada MS III TS 2021-2022.  (17 Februari 2022)	1. Komisi X DPR RI menerima Laporan Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dengan catatan beberapa untuk memperbaiki rumusan rekomendasi. 2. Komisi X DPR RI menerima Laporan Panja RUU Praktik Psikologi dan sudah mendapatkan persetujuan melalui rapat paripurna untuk perpanjangan pembahasan pembicaraan tingkat I. 3. Komisi X DPR RI pada masa reses masa sidang III melakukan kunjungan ke Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Utara.	



## LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

### A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapat Tim Legislasi	Penyusunan Materi Legislasi	<p>1. Tim Kecil Legislasi memberikan waktu kepada fraksi-fraksi untuk mempelajari, mengoreksi, dan memberikan masukan terkait daftar isi dan materi Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah disampaikan oleh Badan Keahlian Dewan Setjen DPR RI kepada Kapoksi.</p> <p>2. Tim Kecil Legislasi menyepakati mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Komisi XI DPR RI, sebagai berikut:</p> <p>a. Masukan dari fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan dibatasi setelah 7 (tujuh) hari Rancangan Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-undangan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI.</p>	Rapat tanggal 14 Februari 2022

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>b. Komisi XI DPR RI akan membentuk Panja untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>c. Panja akan melaporkan kepada Komisi XI DPR RI hasil penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>d. Komisi XI DPR RI akan mengundang Narasumber untuk mendapatkan masukan terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</p> <p>e. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan akan dilakukan harmonisasi di Badan Legislasi.</p>	

## B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

### C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rapar Dengar Pendapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar meningkatkan kinerja pengawasan terhadap pembangunan nasional, badan usaha, dan pengendalian internal yang merupakan sasaran strategis BPKP agar pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dapat terselenggara dengan baik.</li><li>2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan belanja pada tahun 2022, akan diarahkan secara optimal untuk mencapai kualitas belanja yang efisien, produktif, dan efektif dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li><li>3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar meningkatkan kualitas pengawasan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang dapat diberikan kepada APIP Daerah agar lebih</li></ol>	Rapat tanggal 7 Februari 2022

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>efektif melakukan pengawalan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar mengupayakan peningkatan kualitas laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan penguatan pengendalian intern, pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan pendampingan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh APIP dengan melakukan perubahan dan penyempurnaan sistem informasi teknologi.</p>	
2.	Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022	1. Komisi XI DPR RI mendukung upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui e-katalog dan toko daring yang semakin baik serta memperbesar kontribusi barang dan jasa dalam negeri serta UMK/Koperasi untuk memenuhi	Rapat tanggal 9 Februari 2022

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan meningkatkan kualitas kinerja SPSE melalui e-katalog dan toko daring yang ditunjukkan dengan kemudahan akses bagi pengguna SPSE, kejelasan prosedur, dan ketepatan waktu layanan.</p> <p>3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan meningkatkan kontribusi Produk Dalam Negeri dan UMK/Koperasi secara signifikan serta tetap memperhatikan kendali mutu atas produk dalam negeri dan UMK/Koperasi yang masuk dalam daftar e-katalog dan toko daring, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam membangun e-katalog lokal dan toko daring agar memperhatikan kendali mutu bisnis proses dan produk yang didaftarkan.</p>	

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan menyampaikan <i>roadmap</i> dalam meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui SPSE, e-katalog, dan toko daring yang berkualitas.</p>	
3.	Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pusat Statistik	Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk tetap menyediakan indikator strategis tepat waktu dan meningkatkan akurasi berbagai indikator statistik.</li> <li>2. Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk menghasilkan Satu Data Indonesia yang terpercaya validitasnya dan bermanfaat bagi perencanaan dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Badan Pusat Statistik (BPS) berkomitmen untuk turut serta dalam mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem sehingga Pemerintah dapat menetapkan program dan kebijakan yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.</li> </ol>	Rapat tanggal 10 Februari 2022

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Komisi XI DPR RI mendukung peningkatan alokasi anggaran untuk Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun anggaran 2023 dalam rangka peningkatan kualitas data statistik.	
4.	Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan	Tindaklanjut penanganan kasus-kasus industri jasa keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komisi XI DPR RI telah memperoleh penjelasan dari Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi umum industri jasa keuangan dan tindak lanjut penanganan kasus-kasus Industri Jasa Keuangan di Perbankan.</li> <li>2. Otoritas Jasa Keuangan akan memperkuat dan mengembangkan pengaturan, perizinan, dan pengawasan yang dapat menciptakan industri perbankan yang sehat, stabil, berdaya saing, bertumbuh, dan dalam iklim kompetisi yang sehat.</li> <li>3. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan restrukturisasi, baik dalam rangka pandemi COVID-19 maupun non pandemi COVID-19, penyelesaian kredit bermasalah dan penyelesaian bank dalam status pengawasan agar menetapkan skema penyelesaiannya dan dilaporkan secara tertutup dan periodik kepada Komisi XI DPR RI.</li> </ol>	Rapat tanggal 16 Februari 2022

NO	JENIS RAPAT	AGENDA	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>4. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan pengawasan konglomerasi keuangan agar meningkatkan efektifitas pengawasan terintegrasi yang ditunjukkan dengan sistem informasi yang terintegrasi antar pengawas, identifikasi <i>cross cutting issues</i>, dan forum koordinasi yang efektif.</p> <p>5. Otoritas Jasa Keuangan dalam menangani perbankan yang bermasalah, agar tetap melakukan mitigasi risiko dan menjaga stabilitas sistem keuangan.</p>	



## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN LEGISLASI (BALEG)

NO	AKD	PERKEMBANGAN KEGIATAN
1	<b>Badan Legislasi</b>	<p>1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan harmonisasi 5 RUU tentang Provinsi (Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi) (7 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).</p> <p>2. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>2). Hasil Harmonisasi 5 RUU tentang Provinsi (Provinsi NTT, Provinsi NTB, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi) (7 Februari, pukul 15.00 WIB).</li> </ol> <p>3. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, serta Menteri Hukum dan HAM terkait Pembahasan RUU tentang Pendidikan Kedokteran (14 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).</p> <p>4. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka melanjutkan harmonisasi RUU tentang Provinsi Bali (14 Februari 2022, pukul 13.00 WIB).</p> <p>5. Rapat Pleno Badan Legislasi dalam rangka harmonisasi 3 (tiga) RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Penguungan Tengah (16 Februari 2022, pukul 10.00 WIB).</p>

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN (BKSAP)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	BKSAP - KSB	Courtesy Call GKSB DPR RI – Parlemen Spanyol dengan Dubes Spanyol untuk Indonesia, H.E. Fransisco De Asis Aguilera Aranda	Courtesy Call dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Spanyol, Dr. Hj Andi Yuliani Paris, M.Sc., (F-PAN) dan dihadiri oleh dr. Putih Sari (F-PGerindra) dan Dr. H. Suhardi Duka, M.M. (F-PD). Courtesy Call membahas potensi kerja sama sekaligus upaya penguatan hubungan persahabatan Indonesia – Spanyol. Hubungan antara kedua negara yang telah terjalin dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun hubungan kerja sama ekonomi yang benefisial bagi kedua pihak. Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Spanyol juga turut mengundang Duta Besar serta Anggota Parlemen Spanyol untuk menghadiri 144 <sup>th</sup> Assembly di Bali.	Tgl. 8 Februari 2022
2.	BKSAP - KSR	Dialog Interaktif BKSAP DPR RI dengan Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH)	Pertemuan dihadiri oleh Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) Ketua BKSAP, dan para Wakil Ketua BKSAP: Dr. Sihar P.H. Sitorus (F-PDIP), Putu Supadma Rudana, MBA (F-PDemokrat), Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS), Ir. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), serta Anggota BKSAP: dr. Sofyan Tan (F-PDIP), Drs. Darul Siska (F-PGolkar), Ir. Kamrussamad, ST., M.Si (F-PGerindra), Ratih Megasari Singkarru, M.Sc (F-PNasdem), Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LL.M (F-PDemokrat), Syahrul Aidi Maazat, LC., MA (F-	Tgl. 8 Februari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>PKS), Primus Yustisio, SE., MAP (F-PAN), dan Ema Umiyyatul Chusnah (F-PPP).</p> <p>Dialog tersebut merupakan pertemuan pertama yang dilakukan oleh Parlemen di Asia Tenggara dengan CRPH. Dialog membahas upaya pencarian solusi terhadap krisis di Myanmar. Dalam dialog, CRPH dan BKSAP saling bertukar informasi mengenai situasi terkini di Myanmar dan best practice transisi demokrasi di Indonesia.</p> <p>BKSAP mendukung segera terlaksanakannya lima poin konsensus ASEAN dan menyambut peluang Kerjasama yang potensial dengan CRPH untuk mewujudkan Myanmar yang damai dan kondusif serta terciptanya stabilitas kawasan.</p>	
3.	BKSAP - KSR	Forum Konsultasi Parlemen tentang Hak Asasi Manusia (the Office of the UN High Commissioner for Human Rights – OHCHR) untuk wilayah Asia dan Pasifik	<p>Diwakili oleh Anggota BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (F-PDIP) dan Adde Rosi Khoerunnisa (F-PG)</p> <p>Pertemuan diadakan secara virtual dan tertutup dengan tema “Consultation for Parliamentarian: Advancing Implementation of the Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration in Asia and the Pacific (Kesepakatan Global mengenai Migrasi Aman, Tertib dan Teratur (KGM))”.</p> <p>Perwakilan BKSAP DPR RI menyoroti berbagai masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI), dimana Pekerja Migran yang sebagian besar perempuan menghadapi ancaman perdagangan manusia, eksploitasi dan kondisi kerja tidak layak. Pemenuhan HAM dan Hak – hak</p>	Tgl. 8 Februari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dasar bagi PMI masih amatlah rendah. Delegasi mengajak para anggota parlemen yang hadir untuk menyoroti dan menyikapi hal tersebut.	
4.	BKSAP - KSI	Embassy Briefing dengan Duta Besar negara – negara anggota IPU	<p>Pertemuan virtual ini diadakan dengan tujuan untuk menyosialisasikan persiapan penyelenggaraan IPU Assembly ke- 144 yang akan dilaksanakan pada 20 – 24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali, dengan mengusung tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change”.</p> <p>Adapun hal – hal yang dibahas dalam Embassy Briefing: sosialisasi venue dan hotel; protokol kesehatan dan sistem bubble; transportasi; convocation; agenda; serta prosedur pembuatan visa bagi delegasi.</p>	Tgl. 9 Februari 2022
5.	BKSAP - KSB	BKSAP SDGs Day “Peran Strategis Diplomasi Parlemen DPR RI melalui Pendidikan dan Pertukaran Budaya” di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.	<p>Acara dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) dan didampingi oleh Anggota BKSAP DPR RI, Dr. Jazuli Juwaini (F-PKS). Delegasi diterima oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau, Brigjend (Purn.) H. Edy Natar Nasution, S.IP. serta Rektor UIN SUSKA, Wakil Rektor UNRI, dan Wakil Rektor UIR.</p> <p>Selain memaparkan tupoksi BKSAP, Ketua juga menyampaikan bahwa Pendidikan yang menjadi salah satu fokus Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan kunci bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh BKSAP memfasilitasi kerja sama antara Perguruan Tinggi di Provinsi</p>	Tgl. 11 Februari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Riau dengan universitas - universitas di negara lain.	
6.	BKSAP - ABA	BKSAP SDGS Day Dalam Rangka Persiapan Pembentukan Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Melayu di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	Acara dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir (F-PAN). Delegasi BKSAP DPR RI disambut oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Ketua STAIN Sultan Abdurrahman, Ketua STISIPOL Tanjung Pinang, dan Ketua Lembaga Adat Melayu. BKSAP SDGs Day ke Kepulauan Riau merupakan bagian dari kajian possibility and feasibility ide Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Melayu (AAPBM) mengingat Kepulauan Riau memiliki relasi sangat erat dengan Kemelayuan terutama dari perspektif historis dan geostrategis.	Tgl. 11 Februari 2022
7.	BKSAP - KSB	Courtesy Call GKSB DPR RI – Parlemen Turki dengan Dubes Turki untuk Indonesia, H.E. Mrs. Askin Asan	Courtesy Call dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Turki, Muhammad Farhan (F-PNasdem) yang didampingi oleh Muhammad Husni (F-PGerindra), anggota GKSB DPR RI – Parlemen Turki. Pada kesempatan tersebut Ketua GKSB menyampaikan kepada Dubes terkait hasil kunjungan GKSB Turki pada bulan Maret – April 2021 yang membuka banyak peluang kerja sama bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pendidikan dan IPTEK, perdagangan, budaya dan media, serta hubungan antar-parlemen.	Tgl. 14 Februari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dubes menyampaikan bahwa Turki – Indonesia berkepentingan untuk menyelesaikan pengkajian dan penandatanganan Indonesia – Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT – CEPA) oleh kepala negara kedua pihak. Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Turki juga turut mengundang Duta Besar serta Anggota Parlemen Turki untuk menghadiri 144<sup>th</sup> Assembly di Bali.</p>	
8.	BKSAP - KSB	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Iran	<p>Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Iran, Nihayatul Wafiroh (F-PKB) dan dihadiri oleh Anggota GKSB Iran, Rano Karno (F-PDIP), Farida Hidayati (F-PKB), Tifatul Sembiring (F-PKS).</p> <p>Rapat bertujuan untuk membahas program kerja dan rencana kunjungan GKSB ke Iran.</p>	Tgl. 14 Februari 2022
9.	BKSAP - KSI	BKSAP SDGs Day “Sosialisasi Diplomasi Parlemen bersama Civitas Akademika Institut Pertanian Bogor (IPB)”	<p>Delegasi dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Dr. Sihar Sitorus (F-PDIP), dan didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) dan Ir. H. A. Hafisz Tohir (F-PAN) serta didampingi oleh Anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Puteri (F-PDIP), Himmatul Aliyah (F-PGerindra), Darul Siska (F-PG) dan Ratih Megasari Singkarru (F-PNasdem). Delegasi disambut oleh Rektor IPB Arif Satria, Wakil Rektor Bidang Internasionalisasi, Kerjasama dan Hubungan Alumni, Dodik R. Nurrochmat, dan Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis Eva Anggaraini.</p>	Tgl. 14 Februari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Acara diadakan dengan tujuan bertukar informasi, memaparkan tupoksi BKSAP, serta memperoleh dukungan terhadap penyelenggaraan IPU Assembly ke-144.	
10.	BKSAP - KSB	Rapat Pleno ke- 11 dan Rapat Pimpinan ke-27 BKSAP DPR RI	Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam, Lodewijk F. Paulus (F-PG) melantik Gilang Dhielafararez (F-PDIP) sebagai Wakil Ketua BKSAP DPR RI menggantikan Dr. Sihar Sitorus (F-PDIP). Dengan demikian, komposisi pimpinan BKSAP DPR RI adalah sebagai berikut: Dr. Fadli Zon (F-PGerindra), Ketua BKSAP Gilang Dhielafararez (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-PD), Wakil Ketua BKSAP Dr. Mardani (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafisz Tohir (F-PAN), Wakil Ketua BKSAP. Selanjutnya, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon memimpin Rapim ke-27 BKSAP DPR RI. Dalam rapat pimpinan tersebut dibahas berbagai macam rencana program dan kegiatan untuk MSIV. Dibahas pula persiapan IPU 144 <sup>th</sup> Assembly.	Tgl. 15 Februari 2022
11.	BKSAP - KSB	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Jerman	Rapat dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Jerman, Sarifuddin Sudding (F-PAN) dan dihadiri oleh Anggota GKSB Jerman, Andi Rio Padjalangi (F-PG), Anton Sukartono Suratto (F-PD). Rapat bertujuan untuk membahas program kerja dan rencana kunjungan GKSB ke Jerman. Diagendakan pula Courtesy Call dengan Dubes Jerman untuk Indonesia.	Tgl. 16 Februari 2022

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
12.	BKSAP - KSB	Virtual Meeting antara GKSB DPR RI – Parlemen Tunisia dan Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, H.E. Mr. Riadh Dridi.	Acara dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Tunisia, Dr. Kardaya Warnika (F-PGerindra) dan dihadiri oleh Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Tunisia, Boyman Harun (F-PAN) Pihak GKSB memberikan selamat atas terpilihnya Najla Bouden sebagai Perdana Menteri Tunisia, yang merupakan kepala pemerintahan wanita pertama di Tunisia dan Jazirah Arab. Hal ini tentunya menjadi prestasi peningkatan peran wanita di Tunisia dan Kawasan tersebut. Indonesia mendukung penguatan peran demokrasi di Tunisia dan bersedia untuk berbagi pengalaman dalam transisi demokratis demi peningkatan stabilitas politik di Tunisia.	Tgl. 18 Februari 2022



## LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD)

NO	JUDUL	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Mahkamah Kehormatan Dewan telah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukabumi 7 – 9 Februari 2022 dan Kota Cirebon tanggal 14 – 16 Februari 2022 Provinsi Jawa Barat dan dalam rangka Sosialisasi Tugas dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Anggota DPR RI	
		Paket Meeting	Kegiatan Paket Meeting Mahkamah Kehormatan Dewan yang dilaksanakan di Wisma DPR RI Griya Sabha Kopo, Jawa Barat pada tanggal 10 – 12 Februari 2022 bertema “Batasan Perbuatan Etika dan Pidana Dalam Rangka Optimalisasi Sinergi Antara MKD dan Penegak Hukum dalam fungsi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik ” dengan mengundang Pengacara Zainudin Paru, S.H., M.H. sebagai Narasumber.	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Narasumber 1. Dr. Raden Pardede 2. Dr. Tauhid Ahmad (Direktur Eksekutif Indef)	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Mempersiapkan APBN 2023 yang sehat dan kredibel menuju Defisit Anggaran dibawah 3%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan seperti apa yang perlu digunakan untuk memulihkan ekonomi dan mentransformasikan dari kebijakan ekonomi lama kepada kebijakan yang baru, dimana dukungan fiskal diperlukan untuk memfasilitasi transformasi ekonomi tersebut.</li> <li>• Tantangan riil tahun 2022 tidak ringan, Pemerintah perlu memastikan bahwa sejauh mana investasi swasta mulai meningkat untuk menggantikan fungsi fiskal pemerintah dalam mempertahankan pemulihan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hingga tahun 2021, faktor konsumsi masih sangat dominan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Konsumsi akan memicu dan mendorong investasi. Selain itu stimulus fiskal sebagai pemicu (<i>jump start</i>) untuk menggerakkan</li> </ul>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pertumbuhan ekonomi selama krisis terjadi. Adapun program PEN yang sudah dijalankan, berguna untuk pemulihan sektor kesehatan, sosial, dan stimulus bagi sektor UMKM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk mencapai fiskal konsolidasi pada tahun 2023, diperlukan kerja keras dari seluruh <i>stakeholder</i> yang ada. Kebijakan perpajakan dan PNBPN harus mampu mendorong peningkatan penerimaan negara. Dengan demikian diharapkan, penerimaan akan lebih baik dan kembali seperti sebelum terjadinya pandemi. Pada saat yang sama, Pemerintah bisa memanfaatkan dampak positif dari harga komoditas yang masih tinggi. Sedangkan dari sisi belanja, diharapkan bisa kembali pada kondisi normal. Sehingga diharapkan pada APBN tahun 2023 sudah harus mencapai tingkat defisit di bawah 3%.</li> <li>• Dalam merumuskan kebijakan APBN 2023, khususnya terhadap kebijakan belanja negara. Pemerintah perlu memperhatikan beberapa kondisi</li> </ul>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>global dan nasional, antara lain. Adanya Ketidakpastian Global (Inflasi US, Omicron, perlambatan ekonomi Tiongkok), perlunya transformasi struktural (extra belanja) untuk <i>upgrade</i> keterampilan dan infrastruktur teknologi, Kewajiban <i>Contingency</i> (BUMN, infrastruktur, utang), serta melakukan fleksibilitas dalam Konsolidasi APBN. Diharapkan nanti Pemerintah memiliki antisipasi dalam menghadapi situasi tidak pasti baik secara global maupun domestik pada tahun 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat beberapa tantangan pasca Covid-19 atau Post Covid-19 yang kemungkinan akan terjadi dan dialami oleh Indonesia. Antara lain: Pasca <i>commodity boom</i>, pendapatan berbasis SDA menurun; Perubahan struktur perekonomian dari manufaktur ke sektor jasa (sektor <i>informal-non-taxable</i>); Sistem dan administrasi perpajakan belum <i>compatible</i> dengan ICT; Perlu transformasi yang berkelanjutan.</li> </ul>	

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Adapun agenda ke depan yang harus segera dirancang oleh Pemerintah adalah, antara lain: Mengembalikan rasio utang terhadap PDB kembali pada batas aman (30% PDB) dan tahun 2023 merupakan titik puncak; Pengembangan basis investor dalam negeri serta memanfaatkan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; Perbaiki instrumen utang dengan memperhatikan tingkat biaya dan risiko, serta kebutuhan pasar; Meningkatkan efektifitas utang dengan meningkatkan belanja modal dan sektor produktif; Tetap melakukan reformasi perpajakan dan mengurangi ketergantungan dari “boom komoditas.</li> </ul>	
2.	<p>Narasumber 1. Prof. Dr. Ari Kuncoro (Rektor Universitas Indonesia) 2. Prof. Dr. A. Prasetyantoko (Rektor Universitas Atmajaya)</p>	<p>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Menakar Pemulihan Ekonomi Tahun 2022: Peluang, Tantangan, dan Risiko</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak tantangan di tahun 2022 dari mulai konflik energi sampai pada kenaikan harga komoditas yang tentunya akan memengaruhi kondisi ekonomi tahun 2023.</li> <li>Tantangan paling pokok saat ini adalah <i>desrupted global recovery</i> di mana tantangan, peluang, dan risiko yang dihadapi tidak sama dengan proyeksi yan</li> </ul>	-

NO	INSTITUSI	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dibuat pada akhir tahun 2021. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi global yang dikoreksi pada awal Januari 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada tahun 2022 sepertinya akan ada <i>supply desruption</i> sebagai dampak dari varian baru Covid-19 dan risiko perang Rusia vs Ukraina dan Amerika Serikat.</li> <li>• Menghadapi tahun 2022 tidak optimis namun tidak pesimis. Tetapi problemnya lebih ke jangka panjang. Pasca pandemi pemerintah punya peran lebih baik karena situasi berubah, struktur ekonomi berubah. Fiskal harus memberi <i>signal</i> terkait perubahan tersebut. Fungsi fiskal adalah <i>investing for the future</i>. Fiskal harus menyokong jangka panjang terutama <i>investing in human capital</i>.</li> </ul>	

## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA (BURT)

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
1.	Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Rabu, 26 Januari 2022 Agenda: Penyusunan Arah Kebijakan Umum Pengelolaan Anggaran (AKUPA) DPR RI Tahun 2023	1) Penyesuaian Nomenklatur Program dan Kegiatan dengan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI.  2) Pembahasan kegiatan Anggota DPR RI di daerah pemilihan.	
2.	Rapat BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Rabu, 2 Februari 2022 Agenda: Nota Penjelasan Sekjen DPR RI tentang Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2021	Realisasi Anggaran DPR RI sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp.5.471.791.264.185,- atau 94,47% dari pagu.	
3.	Rapat Panja BURT dengan Sekretariat Jenderal DPR RI Kamis, 3 Februari 2022 Agenda: 1) Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2021 Satker Dewan. 2) Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan IV Tahun 2021 Satker Setjen.	1. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Dewan sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp.3.900.692.292.119,- atau 92,76% dari pagu.  2. Realisasi Anggaran DPR RI Satker Setjen sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp.1.571.098.972.066,- atau 99,01% dari pagu.	

NO	KEGIATAN	PERKEMBANGAN	KETERANGAN
4.	<p>Rapat BURT dengan Tim Setjen DPR RI 4-6 Februari 2022</p> <p>Agenda: Penyusunan Draf AKUPA DPR RI Tahun 2023</p>	<p>1. Pembahasan persentase kebutuhan anggaran DPR RI terhadap APBN.</p> <p>2. Pembahasan tentang Tim Kuasa Hukum DPR RI.</p>	
5.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Pengawasan pelayanan program Jamkestama yang dilaksanakan rumah sakit provider Asuransi Jasindo:</p> <p>1. Tanggal, 23-25 Januari 2022, ke RS. National Hospital Surabaya.</p> <p>2. Tanggal 30 Januari-1 Februari 2022 ke RSUD Bogor.</p>	<p>Peninjauan rumah sakit provider Asuransi Jasindo dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi BURT terhadap pelayanan program Jamkestama.</p>	
6.	<p>Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Peninjauan pelayanan keprotokolan untuk Anggota DPR RI di Stasiun Kereta. Tanggal, 27-29 Januari 2022, ke Stasiun Kereta Bandung.</p>	<p>Setelah dilakukan penandatanganan Note Kesepahaman (MoU) antara PT. KAI dengan Sekretariat Jenderal DPR RI tentang pelayanan keprotokolan untuk Anggota di Stasiun Kereta. BURT memandang perlu melakukan peninjauan ke beberapa stasiun kereta untuk melihat kesiapan PT.KAI menyiapkan berbagai kebutuhan meliputi sarana, prasarana, serta sumber daya manusia agar proses keprotokolan untuk Anggota DPR RI saat menggunakan jasa kereta dapat berjalan dengan lancar.</p>	



## LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA (BAKN)

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat/Paket Meeting dengan narasumber dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penyusunan Buku Telaah BAKN terhadap LHP BPK RI tahun 2021 Semester I pada Mitra Kerja Komisi VI dan Komisi VII.	Paket Meeting, tanggal 11 s.d 13 Februari 2022
2.	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.	Akuntabilitas Keuangan Negara.	BAKN DPR RI melakukan Rapat/Paket Meeting dengan narasumber dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penyusunan Buku Telaah BAKN terhadap LHP BPK RI tahun 2021 Semester I pada Mitra Kerja Komisi I dan Komisi XI.	Paket Meeting, tanggal 14 s.d 16 Februari 2022

\*\*\*\*\*